

RENCANA AKSI TRIWULAN I
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Targer Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama				Program	Kegiatan	Output	Target	Keterangan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah- Langkah/Aktivitas Pencapaian Target IKU	TW I	TW II	TW III						TW IV
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing untuk meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase KPM Tergraduasi dari program kemiskinan	25%	25%	25%	25%	Meningkatkan pembinaan, Verifikasi dan melakukan ground cek berkala	-	-	-	-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	20 orang	
			25%	25%	25%	25%	Melakukan pembinaan operator, verifikasi dan validasi data	1,264	5,162	-	-		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	20623 orang	
			25%	25%	25%	25%		14	35				Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	250 usulan		
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)			50%	50%	Pelaksanaan pelatihan dalam peningkatan kualitas keluarga	0	1.24	-	-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	15 Lembaga	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Instansi Pemerintah	25%	25%	25%	25%	Konsistensi antar dokumen (RPJMD-Renstra-PK)	1	2.64	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	
							Penyelarasan dokumen perencanaan									
Pengumpulan data yang valid dan akurat																
Monitoring dan evaluasi triwulanan/bulanan																
2	Meningkatkan kualitas inovasi perangkat daerah	Nilai Kematangan Inovasi	25%	25%	25%	25%	Mengidentifikasi dan merumuskan inovasi	4	3	-	-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan		
							Penguatan regulasi dan kelembagaan inovasi	3	4	-	-			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
							Digitalisasi dan dokumentasi inovasi	1	0	-	-		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 p:aket	
							Pelaporan ke sistem inovasi Daerah	0	0.47	-	-			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	
								0.2	0.72	-	-			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	

								0.4	0	-	-			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	
								2.15	4.97	-	-			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	
								0	1	-	-		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	
								3	3	-	-		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	
								0	12	-	-			Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 paket	
								25	8	-	-		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	
								12	12	-	-			Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	32 unit	
								0.22	0.56	-	-			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	
3	Meningkatkan Kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	25%	25%	25%	25%	Melakukan pendataan lembaga kesejahteraan, perizinan serta memfasilitasi layanan kesejahteraan bagi warga panti	3.55	1.7	-	-	Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	
			25%	25%	25%	25%		3.46	27.71			Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	
			25%	25%	25%	25%		5.67	18.35					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	
			25%	25%	25%	25%		1.67	7.41					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	
			25%	25%	25%	25%	Mendistribusikan bantuan kepada korban yang terkena bencana	39.25	37.38	-	-	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	
			25%	25%	25%	25%	Memberikan dukungan moril kepada korban yang terkena bencana	16.57	41.47	-	-			Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	

			25%	25%	25%	25%	Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan makam pahlawan dan taman makam pahlawan	0.14	0.18	-	-	Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	
4	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	100%	-	Koordinasi dengan perangkat daerah dan vertikal terkait PUG	0.2	0.26	-	-	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	
			25%	25%	25%	25%	Melaksanakan pertemuan bulanan, seminar GOW	2.35	6.07	-	-		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Junlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,Hukum,Sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	23 orang	
			25%	25%	25%	25%	Melaksanakan kegiatan seminar DWP, Pelatihan IKAD	0.02	0.4	-	-			Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,Hukum,Sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	80 dokumen	
					50%	50%	Sosialisasi pencegahan terhadap perempuan, Pelatihan SDM manajemen kasus perempuan	0	0	-	-	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	15 lembaga	
			25%	25%	25%	25%	Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada unsur terkait, Melakukan pendekatan pada lembaga organisasi masyarakat	0.16	0.57	-	-		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	7 orang	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan vertikal terkait data terpilah	0.18	0.27	-	-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dengan lintas sektor terkait Pemenuhan hak Anak, Workshop peningkatan kapasitas forum anak	2.07	3.51	-	-	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 lembaga	

				50%	50%	Sosialisasi pencegahan terhadap anak, Pelatihan SDM manajemen kasus Anak	0	12.62	-	-	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2 orang	
			25%	25%	25%	Melakukan advokasi dan sosialisasi dengan unsur terkait, promosi dan edukasi terkait tupoksi UPTD	4.42	11.91	-	-		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	60 orang	

Painan, 1 Juli 2026

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA,S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002